



**SIARAN PERS**  
**EXECUTIVE MEETING KOORDINASI KEMENTERIAN/LEMBAGA**  
**DALAM RANGKA PENGAWASAN PLTN**  
**18 Februari 2022**  
**Nomor: 001/SP/HM 02/BHKK/II/2022**

Program Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan perencanaan, persiapan, dan investasi yang cermat terhadap waktu dan sumber daya manusia. Lebih lanjut, program PLTN ini memiliki perbedaan yang mencolok karena adanya persyaratan keselamatan, keamanan dan garda-aman terkait dengan penggunaan bahan nuklir.

Saat suatu negara memutuskan untuk memulai program PLTN maka hal itu harus didasarkan pada komitmen untuk menggunakan tenaga nuklir secara selamat, aman dan damai. Komitmen besar ini membutuhkan pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan dari berbagai pihak, antara lain badan pengawas.

BAPETEN sebagai badan pengawas yang mendapatkan tugas melaksanakan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997, perlu menyiapkan strategi dan infrastruktur dalam rangka pengawasan PLTN.

Dalam penyiapan infrastruktur ini, BAPETEN akan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga lainnya sehingga diperlukan suatu forum bagi Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam pengawasan PLTN untuk saling berkomunikasi dan berkoordinasi.

Sebagai salah satu sarana berkomunikasi, Jum'at (18/02/2022) BAPETEN menyelenggarakan *executive meeting* yang diharapkan dapat menjadi ajang bertukar informasi antar Kementerian/Lembaga terkait pengawasan PLTN di Indonesia, serta menjadi forum awal bagi Kementerian/Lembaga untuk memastikan bahwa pemerintah siap untuk menyelenggarakan pengawasan PLTN di Indonesia.

Dalam *executive meeting* yang dihadiri berbagai perwakilan Kementerian/Lembaga, antara lain Dewan Energi Nasional (DEN), BAPPENAS, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PUPR, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, dan berbagai Kementerian/Lembaga lainnya ini, Plt. Kepala BAPETEN dalam sambutannya berharap *executive meeting* dapat menjadi forum *knowledge sharing* awal bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengawasan PLTN dan nantinya akan menjadi bahan Penyusunan dan penyempurnaan Roadmap dan Program Strategis Pengawasan PLTN.

Melalui *executive meeting* ini diharapkan dapat dihasilkan rencana tindak bersama dari setiap Kementerian/Lembaga yang terlibat untuk menyusun kebijakan dan strategi nasional peningkatan dan penguatan infrastruktur pengawasan pembangunan PLTN pertama di Indonesia. Dalam kesimpulan akhir *executive meeting*, disepakati bahwa perlu dibentuk

rencana tindak sebagai kelanjutan *executive meeting* untuk menyelaraskan program antar Kementerian/Lembaga agar proses perizinan dan pengawasan PLTN dapat berjalan dengan baik. Beberapa rencana tindak yang direncanakan adalah *regulatory forum* untuk membahas isu tata ruang (darat dan laut); isu Sertifikat Laik Bangunan; isu kompetensi SDM dan SMK3; serta isu Otorisasi Pusat-Daerah.

**Narahubung BAPETEN:**

- 1) Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik  
Indra Gunawan (+62 812 1001 2371)**
- 2) Koordinator Komunikasi Publik  
Abdul Qohhar (+62 877 8867 4717)**